

PENGARUH RELIABILITAS BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN: STUDI PANEL KOTA MAGELANG TAHUN 2015-2024

Nurul Aulia¹, Heny Rizkiana², Muhammad Afif Fathur Risya³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Na625854@gmail.com¹, henirizkiana@gmail.com², Afiffathur600@gmail.com³.

Abstract

This study aims to determine the effect of the realization of local government capital expenditure on the poverty rate in Magelang City during the 2015-2024 period. This study is based on the importance of effective regional financial management through capital expenditure to reduce the poverty rate. This researcher uses a quantitative approach method with secondary time series data obtained through local government financial reports, BPS reports, and other publications. This researcher uses the T test and F test to measure the level of influence partially and see the research variable model used, using a simple linear regression equation analysis method with the SPSS application to perform data management. This equation will test the effect of variable X (Capital expenditure) on variable Y (Poverty level). The results of this study show the equation $Y = 6.536 + 0.000005871X$ which says that the realization of the capital expenditure budget has a positive but not significant effect on the poverty rate can be seen with a Sig. value of 0.436 greater than the Sig. Value. (0.005). The equation also shows that if the level of increase in capital expenditure is Rp. If the capital expenditure value is 0, the poverty rate will increase by 0.000005871%. If the capital expenditure value is 0, the poverty rate will be 6.536%. The R-Square (R^2) value in this study is 0.078, indicating that only 7.8% of the poverty rate can be explained by the realization of the capital expenditure budget. This study demonstrates the importance of public sector management accounting using the value-for-money approach in determining government policies that benefit the public.

Keywords: Poverty rate, Capital expenditure, Magelang City, VFM approach, Public sector accounting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi belanja modal pemerintah daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Magelang selama periode 2015-2024. Penelitian ini didasari oleh pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif melalui belanja modal guna menurunkan tingkat kemiskinan. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan data sekunder time series yang diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah daerah, laporan BPS, dan publikasi lainnya. Peneliti ini menggunakan uji T dan uji F untuk mengukur tingkat pengaruh secara parsial dan melihat model variabel peneliti yang digunakan, dengan menggunakan metode analisis persamaan regresi linear sederhana dengan aplikasi SPSS untuk melakukan pengelolaan data. Persamaan ini akan menguji pengaruh variabel X (Belanja modal) terhadap variabel Y (Tingkat kemiskinan). Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan $Y = 6,536 + 0,000005871X$ yang mengatakan bahwa realisasi anggaran belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dengan nilai Sig. 0,436 lebih besar daripada nilai Sig. (0,005). Persamaan tersebut juga menunjukkan jika tingkat kenaikan belanja modal sebanyak Rp. 1 maka malah akan meningkatkan tingkat kemiskinan akan

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sebesar 0,000005871% dan jika nilai belanja modal 0 maka tingkat kemiskinan menjadi sebesar 6,536%. Dan nilai R Square (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,078 yang menerangkan jika hanya 7,8% tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh realisasi anggaran belanja modal. Penelitian ini menunjukkan pentingnya akuntansi manajemen sektor publik dengan menggunakan Pendekatan *value for money* dalam menentukan kebijakan pemerintah yang bermanfaat untuk publik.

Kata Kunci: *Tingkat kemiskinan, Belanja modal, Kota Magelang, Pendekatan vfm, Akuntansi sektor publik.*

1. Pendahuluan

Untuk mengukur keberhasilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilihat dari hasil laporan realisasi APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu melakukan pengambilan keputusan dan melakukan perencanaan pembangunan, dan dapat menjadi sumber pembangunan ukuran-ukuran untuk melakukan evaluasi kinerja atau output pengalokasian sumber data (Nurmainah, 2013).

APBD memiliki tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah merupakan komponen yang mengumpulkan semua penerimaan yang menjadi milik pemerintah daerah tersebut, belanja daerah merupakan semua komponen pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan, melayani, dan melakukan pembangunan yang pastinya akan bermanfaat untuk masyarakat, dan terakhir pembiayaan daerah yaitu, penerimaan atau pengembalian anggaran dalam pemerintahan untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus. Salah satu dari ketiga komponen tersebut yang menjadi komponen pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk melakukan pelayanan publik yaitu komponen belanja daerah. Belanja daerah sendiri memiliki pos-pos pengeluaran didalamnya antara lain, pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos belanja lainnya.

Pos belanja modal dapat menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Anggaran belanja modal dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapatkan aset tetap atau aset tetap tak berwujud yang dapat bermanfaat jangka panjang untuk masyarakat. Menurut Digdowiseiso et al., (2022) belanja modal dapat menjadi tolak ukur untuk produktivitas dalam pemerintah dalam pemanfaatan anggaran daerah. Tujuan utama dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal juga menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, karena hasilnya akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, sehingga keberhasilan pengelolaan anggaran belanja modal diharapkan dapat menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan akuntansi dan menjadi pendoman dalam penetapan anggaran belanja modal daerah ke depan.

Dengan adanya belanja modal yang menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk masyarakat diharapkan akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan manfaat yang ada di baliknya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih belum mampu ditangani oleh banyak negara-negara yang ada di dunia. Tidak luput juga dengan Indonesia, pada tahun 2024 sebanyak 24,06 juta penduduk di Indonesia berada di dalam garis kemiskinan dan sekitar 5,94% penduduk miskin berada atau bertempat tinggal di Kota Magelang. Kota Magelang memiliki wilayah 18,12 KM2 yang terbagi menjadi 3 kecamatan dan 17 kelurahan yang berada pada Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini akan melakukan pengujian perihal pengaruh belanja modal pemerintahan daerah Kota Magelang terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi di sana. Namun terkadang anggaran belanja modal tidak dapat direalisasikan 100% oleh karena itu peneliti ini akan

menggunakan anggaran realisasi belanja modal yang dilaporkan secara berkala setiap tahunnya oleh pemerintah daerah Kota Magelang pada periode 2015-2024 agar dapat melihat pengaruh realisasi anggaran belanja modal dengan tingkat kemiskinan yang terjadi dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan value for money dalam akuntansi manajemen sektor publik.

2. Tinjauan Pustaka

Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Di dalam akuntansi, manajemen sektor publik merupakan istilah sudah sangat dikenal karena memiliki peran penting dalam membantu organisasi publik mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Pengamatan menggunakan manajemen sektor publik sangat terpengaruh jika terjadi perubahan didalam layanan publik dan perubahan didalam akuntansi publik. Hal ini menyebabkan pemahaman mengenai definisi akuntansi manajemen sektor publik. Karena pemahaman ini menggabungkan antara akuntansi manajemen dengan sektor publik.

Menurut *Chartered Institute of Management Accountants* (CIMA) dalam jurnal Annisa et al., (2025), akuntansi manajemen bertujuan untuk dapat menjadi perancang, ukuran, evaluasi, dan menjadi pengendali didalam perusahaan dan menjadi penjamin kepatuhan serta tanggung jawab saat menggunakan sumber daya. Akuntansi manajemen merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, melakukan pengukuran, akumulasi, menganalisis, penyusunan, interpretasi dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen. Arti akuntansi manajemen didalam profesi merupakan kolaborasi dalam mengambil keputusan manajerial, melakukan perancangan serta pengukuran kinerja, untuk penyediaan pengetahuan yang berasal dari laporan keuangan dan digunakan untuk melakukan pengendalian yang akan membantu manajemen dalam melakukan pengembangan dan realisasi strategi organisasi.

Sektor publik dalam ilmu ekonomi biasanya diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki tujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik biasanya digunakan untuk istilah untuk organisasi publik (terutama pemerintah) yang menggunakan anggaran dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan begitu tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada akuntan sektor publik adalah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan internal organisasi dan kebutuhan pihak eksternal.

Sehingga definisi akuntansi manajemen sektor publik adalah tata cara untuk memberikan informasi yang sesuai sehingga dapat diandalkan untuk digunakan oleh kepada pemimpin dalam sektor publik yang akan berguna dalam melakukan perencanaan dan pengawasan.

Pendekatan *Value for Money*

Value for Money (VFM) merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik dengan nilai keberhasilannya tidak hanya dari aspek keuangan, namun juga dapat memberikan manfaat diluar aspek keuangan. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau organisasi dapat menghasilkan nilai yang sama dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Mahmud dalam Halim dan Kusufi (2013:132), VFM menerangkan jika, pendekatan ini menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi nilai guna yang optimal Yuliyanto et al., (2023). Selain itu, Mardiasmo (2009:4) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja berbasis VFM bertumpu pada tiga aspek utama yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi dan juga aspek efektivitas (Dwi Agustin & subardjo, 2017).

Pengukuran ini berfungsi mendukung akuntabilitas manajerial, memberikan informasi bagi pengambilan keputusan, serta mengarahkan perhatian manajemen pada area yang memerlukan perbaikan. Mardiasmo menegaskan bahwa ketiga elemen tersebut menjadi dasar utama dalam penerapan VFM. Unsur ekonomi menggambarkan kemampuan organisasi

memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai pada biaya serendah mungkin. Mahsun menyatakan bahwa pengukuran ekonomi menilai tingkat kehematan melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi, serta menilai apakah biaya yang dikeluarkan sudah efisien apabila dibandingkan dengan organisasi serupa. Dengan demikian, VFM menjadi alat penting yang dapat memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan baik dan benar, menghasilkan output yang optimal, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.

1. Ekonomi

Ekonomi menggambarkan kemampuan organisasi memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pada biaya serendah mungkin. Konsep ekonomi menekankan penghematan dalam pengadaan sumber daya tanpa mengurangi mutu layanan. Pengukuran ekonomi biasanya dilakukan dengan membandingkan anggaran dan realisasi, menilai apakah biaya lebih besar daripada batas yang telah ditetapkan, serta melihat apakah beban biaya lebih tinggi dibandingkan organisasi pembanding. Melalui analisis ekonomi, organisasi dapat menilai apakah pengeluaran telah dilakukan secara hemat dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

2. Efisiensi

Efisiensi dilakukan untuk menilai hubungan antara biaya yang digunakan dengan hasil yang diterima, atau seberapa besar hasil yang diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Program dapat dianggap efisien saat mampu memberikan output maksimum dengan menggunakan sumber daya tertentu, atau dapat menghasilkan output yang sama dengan biaya lebih rendah. Pengukuran efisiensi menunjukkan apakah organisasi mampu mengelola anggaran, tenaga kerja, waktu dan aset secara optimal.

3. Efektivitas

Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan atau target program telah tercapai. Unsur efektivitas tidak hanya menilai output, tetapi juga outcome dampak yang dihasilkan dari suatu program. Efektivitas menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan belanja publik, karena meskipun suatu kegiatan hemat dan efisien, kegiatan tersebut dianggap tidak berhasil jika tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam konteks pembangunan daerah, efektivitas dapat diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan akses infrastruktur, serta perbaikan layanan publik.

Dengan begitu, pendekatan Value for Money menjadi dasar teori yang dalam diandalkan untuk melakukan menganalisis bagaimana belanja modal pemerintah daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas berperan penting untuk menjelaskan realisasi belanja modal dapat atau tidak dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Magelang.

Belanja Modal

Menurut Deviana et al., (2018) Belanja modal merupakan bagian biaya pengeluaran yang menjadi pengeluaran rutin untuk dapat bentukan modal pemerintah daerah. Dan menurut kementerian keuangan belanja modal merupakan anggaran pengeluaran yang digunakan untuk dapat memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang akan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dapat diartikan jika belanja modal adalah pengeluaran rutin pemerintah yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang

Laporan yang dipublikasi oleh PPID Kota Magelang dalam laporan tahunan realisasi anggaran (LRA) pada tahun 2024 didalam pos belanja modal terdapat pos-pos digunakan untuk, sebagai berikut:

- a. Belanja modal tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

f. Belanja modal aset lainnya.

Kemiskinan

Kemiskinan sendiri merupakan kondisi dimana seseorang atau satu keluarga belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti untuk makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan aset terhadap penyembuhan jika kesehatan terganggu. Badan Pusat Statistik (BPS Indonesia, 2024) menjelaskan jika kemiskinan diukur berdasarkan seberapa efektif seseorang dapat mengelola keuangannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan (garis kemiskinan). Garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 595.242 per kapita per bulannya dengan komposisi, Rp 443.433 yaitu makanan dan Rp 151.809 yaitu non makanan pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.

Kemiskinan bukan hanya masalah saat mendapatkan penghasilan rendah, namun juga saat terjadi kesulitan atau keterbatasan untuk menjangkau akses pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang layak. Kemiskinan juga merupakan suatu pengukur kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi tingkat kemiskinan yang ada dalam sebuah daerah semakin sulit juga masyarakat yang ada dalam daerah tersebut memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kemiskinan sendiri dibedakan menjadi beberapa kategori:

1. Kemiskinan absolut, yaitu kondisi masyarakat yang benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi terjadinya perbedaan yang terlihat jelas antara penduduk yang bercukupan dan penduduk yang berada di garis kemiskinan dalam suatu wilayah.
3. Kemiskinan kultural, yaitu kondisi dimana kemiskinan sudah terbentuk karena kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat.
4. Kemiskinan struktural, yaitu kondisi dimana di dalam masyarakat tertentu sudah terstruktur dan mereka yang berada di dalamnya tidak dapat menggunakan sumber daya yang tersedia.

Hubungan Belanja Modal dengan Kemiskinan

Secara konseptual, belanja modal memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan karena keduanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah. Meningkatkan belanja modal daerah seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Jika alokasi anggaran belanja modal tidak dialokasikan dengan baik dan benar, maka dampak terhadap pengentasan kemiskinan menjadi kecil. Oleh karena itu, belanja modal dapat dijadikan suatu sarana pemerintah yang akan berguna untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Terutama belanja modal merupakan salah satu bagian pengeluaran rutin daerah yang semestinya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan.

Penelitian Sebelumnya

Amami & Asmara, (2022) menemukan bahwa secara simultan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006-2020, namun jika secara parsial PAD tidak berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi tahun 2006-2019.

Rahmawati et al., (2024) menerangkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, namun belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah, belum mampu menurunkan secara signifikan kemiskinan di wilayah tersebut.

Sirait, (2023) menemukan jika belanja modal berpengaruh langsung secara positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi berpengaruh langsung secara negatif terhadap kemiskinan di wilayah Regional Kalimantan.

Deviana et al., (2018) menyatakan bahwa anggaran belanja modal bukan hanya dilakukan untuk pembelian aset tetap, namun juga digunakan untuk pengentas kemiskinan dengan melakukan OPD yang telah ditetapkan oleh BAPPENAS di pemerintahan Kabupaten Seluma. Dalam penelitiannya bahwa: 1. Bagian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi pembangunan jaringan jalan. Pembangunan jaringan irigasi dan air bersih. 2. Dinas pertanian, melakukan pembelanjaan bantuan untuk benih tanaman pangan, melakukan subsidi pupuk, belanja bantuan alat-alat dan mesin pertanian, pembangunan, dan perbaikan jalan irigasi. 3. Bagian dinas sosial, melakukan bantuan terhadap kelompok usaha bersama, rumah tidak layak huni, bantuan karang taruna, bantuan program keluarga harapan, bantuan lansia produktif. 4. Bagian dinas pendidikan dan budaya, meliputi pembangunan dan rehabilitas sekolah, pembangunan gedung laboratorium sekolah, pembangunan sarana prasarana sekolah. 5. Bagian dinas kesehatan, meliputi pembangunan gedung puskesmas, sunatan massal, fogging, dan pengadaan obat-obatan.

Natalia et al., (2019) menerangkan jika variabel belanja modal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan metode jenis penelitian kuantitatif, karena tujuan utamanya untuk dapat mengukur besaran pengaruh realisasi belanja modal daerah dengan tingkat kemiskinan di Kota Magelang. Sugiyono, (2019) menjelaskan jika metode penelitian kuantitatif adalah metode yang dapat digunakan untuk melakukan peneliti sampel tertentu atau populasi, dalam metode ini, penelitian dilakukan dengan, teknik pengumpulan data yang menggunakan alat penelitian, setelah itu ada data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan teknik persamaan analisis linear sederhana, teknik ini digunakan untuk merancang model dan mengukur dampak dari atau satu variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder time series untuk melihat perbandingan lebih banyak mengenai pengaruh didalam penelitian, yaitu data dari tahun 2015 sampai 2024 yang diperoleh dari rujukan dan referensi yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah, data yang telah di publish, laporan-laporan terdahulu, jurnal, dan dokumentasi buku. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung. Dan pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan catatan, laporan yang sudah ada, atau publikasi lainnya. Analisis ini dilakukan untuk melihat atau mengetahui besaran hubungan antara belanja modal dengan tingkat kemiskinan menggunakan angka-angka dan perhitungan dalam aplikasi pengelolaan data SPSS.

Metode analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis persamaan analisis regresi linear sederhana yang dimaksudkan untuk dapat memberikan besaran angka pengaruh variabel X (Belanja modal) dengan variabel Y (Tingkat kemiskinan) dalam jangka waktu tahun 2015 sampai 2024.

Model persamaan:

$$Y = \alpha + BX$$

Ket.

Y : Tingkat Kemiskinan

α : Konstanta

B : Koefisien Regresi

X : Belanja Modal

Hipotesis

Dengan melihat penelitian sebelumnya dan tujuan penelitian, maka peneliti ini membuat beberapa hipotesis yang diharapkan agar penelitian ini dapat berjalan selaras dengan tujuan yang ada.

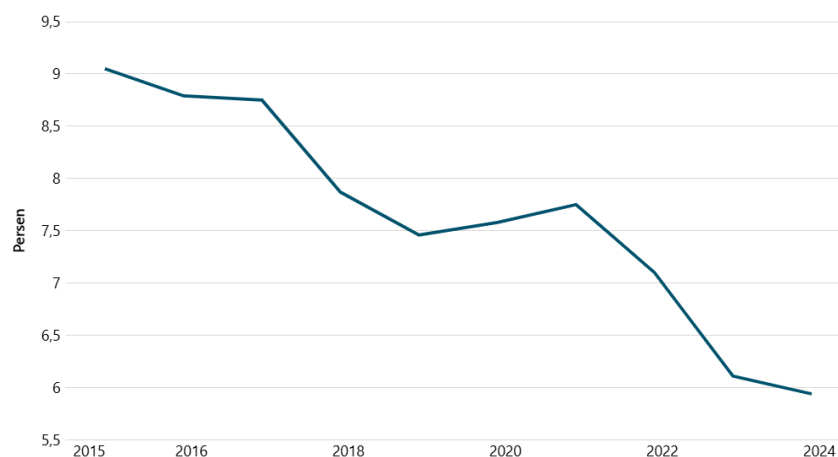
H1 : Menduga bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y

H2 : Menduga variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

Data-data

Penduduk miskin di Kota Magelang

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan



Dari data grafik diatas masyarakat miskin di Kota Magelang pada tahun 2015 sampai 2024 menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi Kota Magelang mengalami penurunan tiap tahunnya, dapat dilihat dari tahun 2015 yang mencapai 9,05 persen sedangkan untuk tahun 2024 mengalami penurunan dan menuju angka 5,94 persen. Untuk melihat data lebih lengkap peneliti ini membuat, tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kota Magelang

Tahun	Presentase
2024	5,94
2023	6,11
2022	7,10
2021	7,75
2020	7,58
2019	7,46
2018	7,87
2017	8,75
2016	8,79

2015	9,05
------	------

Data realisasi belanja modal Kota Magelang

Dari data realisasi belanja modal Kota Magelang dalam dokumen realisasi anggaran (LRA) yang ditemukan sebagai berikut: (Penelitian ini akan menggunakan data dalam bentuk satuan milyar rupiah untuk dapat mempermudah).

Tabel 2. Realisasi Belanja Modal

Tahun	Realisasi Belanja Modal
2024	166.117
2023	151.577
2022	154.810
2021	186.005
2020	116.558
2019	272.055
2018	237.418
2017	233.070
2016	221.924
2015	141.308

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Variable	Koefisien Regresi (B)	Sig	Keterangan
Profesionalisme (X2)	5,871E-6	0,436	H1 dan H2 ditolak
Konstanta		6,536	
Nilai Koefisien Determinasi (R)		0,279	
R Square (R ²)		0,0078	
Y		Tingkat Kemiskinan	

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Melihat hasil uji analisis diatas Hasil uji analisis regresi linear sederhana dapat dimasukan dalam persamaan berikut:

$$Y = \alpha + BX$$

$$Y = 6,536 + 5871E-6X$$

Persamaan diatas menunjukkan jika:

1. Nilai konstanta 6,536 menunjukkan nilai tetap jika variabel $X = 0$, atau saat belanja modal bernilai 0 maka diperkirakan akan membuat 6,536% pada tingkat kemiskinan.
2. Koefisien regresi bernilai 5,871E-6 atau setara 0,000005871 yang memiliki arah hubungan positif, yang berarti jika setiap kenaikan belanja modal Rp. 1 maka dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000005871%.

3. Selain itu, nilai Sig. yang di tabel 3. Menunjukkan angka 0,436 atau lebih besar dari pada nilai sig. (0,05) yang menunjukkan jika belanja modal tidak mempengaruhi secara signifikan dengan tingkat kemiskinan.

Uji T dan uji F

Tabel 6. Hasil Uji T dan Uji F

Variable	Sig. F	Sig. t
Belanja Modal (X)	0,436	0,436

Sumber : Data diolah menggunakan apl SPSS, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan, bahwa:

1. Uji T : Variabel X yaitu belanja modal tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan yang terjadi.
2. Uji F : Model variabel tidak berpengaruh signifikan.

4.2 Pembahasan

Setelah menemukan hasil penelitian, dapat disimpulkan, jika:

H1 : Variabel X (realisasi belanja modal) hanya sedikit mempengaruhi variabel Y (tingkat kemiskinan) dapat dilihat dari persamaan di hasil, bahwa jika nilai belanja modal 0 maka tingkat kemiskinan sebesar 6,536% dapat dilihat pada nilai konstanta, begitu pula dengan koefisien jika belanja modal mengalami peningkatan sebesar 1 maka hanya akan mempengaruhi peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 0,000005871%, walaupun memiliki arah nilai positif, tetapi pengaruh yang diberikannya sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik.

H2 : Variabel X yaitu belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, yaitu tingkat kemiskinan, hal ini ditujukan dengan perolehan nilai signifikan (Sig.) yang terlalu besar melebihi nilai Sig. (0,05) yaitu sebesar 0,436.

Selain mendapatkan hasil untuk menjawab hipotesis yang ada, peneliti ini juga menemukan jika tingkat kemiskinan hanya dapat dijelaskan oleh belanja modal sebesar 7,8% dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lainnya. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pos-pos belanja modal yang dikeluarkan pemerintah Kota Magelang, terhadap pos anggaran untuk membeli peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan seharusnya dapat dikaji lebih lanjut karena pos-pos tersebut akan berkurang nilainya karena terdapat penyusutan setiap tahunnya dan dapat mengurangi modal yang ada sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan belanja modal yang sudah dibahas. Selain itu, penggunaan realisasi anggaran belanja modal Kota Magelang banyak digunakan untuk membeli aset berwujud, padahal anggaran belanja modal dapat dikeluarkan untuk pembelian aset tidak berwujud yang memberikan manfaat jangka panjang dan meningkatkan modal.

Banyak aset tidak berwujud yang bermanfaat untuk jangka panjang dan tetap dapat meningkatkan modal untuk kedepannya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Deviana et al., (2018) yang menjelaskan jika anggaran belanja modal tidak hanya untuk pembelian aset tetap.

Pemerintah Kota Magelang dapat melihat bahwa belanja modal yang ada belum mampu mempengaruhi penurunan kemiskinan, padahal tujuan anggaran belanja modal pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat dan pastinya akan berakhir untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi. Manfaat jangka panjang bukan hanya dapat diciptakan oleh aset berwujud, namun dapat juga diciptakan oleh aset tidak berwujud, seperti pendidikan, dengan pendidikan masyarakat pastinya akan mampu untuk meningkatkan taraf tingkat pendapatannya sehingga tingkat kemiskinan akan menurun

karena masyarakat mampu membiayai diri mereka sendiri dan melepaskan diri dari kemiskinan.

Pemerintah juga dapat memberikan bantuan untuk UMKM dalam pengelolaan usaha mereka, dengan meningkatnya UMKM maka akan meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan menambah modal untuk pemerintahan daerah, meningkatnya UMKM daerah juga akan menambah lapangan pekerjaan baru. Walaupun peningkatan UMKM tidak langsung memberikan manfaat pada masa kini, namun sesuai dengan tujuan belanja modal yang akan memberikan manfaat pada periode selanjutnya. Dengan begitu pemerintah daerah terutama pemerintahan Kota Magelang dapat menambah pos anggaran untuk aset tak berwujud seperti yang sudah diterangkan diatas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang tertera menunjukkan bahwa peningkatan realisasi belanja modal pemerintahan Kota Magelang belum secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut, sehingga diperlukan optimalisasi dan penggunaan belanja modal yang lebih tepat sasaran sehingga manfaat yang dihasilkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Peneliti mengakui banyak sekali keterbatasan dalam melakukan penelitian karena hanya mengambil satu variabel padahal tingkat kemiskinan yang ada dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain dan membuat penelitian belum sepenuhnya mampu menggambarkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan. Peneliti ini juga menyadari bahwa masih banyak keterbatasan lainnya yang belum dapat disampaikan.

Untuk peneliti selanjutnya, peneliti ini menyarankan untuk menambah variabel atau faktor lainnya, memperluas wilayah penelitian atau menggunakan metode analisis lain yang lebih kompleks untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan pastinya akan memberikan manfaat lebih untuk akademis atau pengambil keputusan kebijakan selanjutnya.

Peneliti ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara teori akuntansi manajemen publik dengan pembangunan daerah, oleh sebab itu, akuntansi manajemen perlu dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam membuat anggaran pemerintah agar setiap pengeluaran belanja modal dapat memberikan nilai tambah yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Ucapan terima kasih

Rasa puji dan syukur peneliti sampaikan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan akan memberikan manfaat untuk kedepannya bagi penulis, pemberi kebijakan, maupun untuk penelitian selanjutnya. Peneliti juga ingin menyampaikan terimakasih kepada bapak Aryanto Nur, SE, MM dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen atas bimbingan serta arahannya selama proses penyusunan jurnal. Penelitian ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11(2), 48-54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Angka Kemiskinan Kota Magelang. (2025). <https://magelangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/angka-kemiskinan.html> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Annisa, R. A., Christina, A., Diredja, M., Fadia, S. S., & Dewi, C. L. (2025). *Peran Akuntansi Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Perusahaan di PT Ace Hardware*

- Indonesia Tbk. <https://doi.org/10.61132/jurnalrimba.v3i4.2333> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Ardiansyah, A., & Mahargiono, P. B. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pontjo Bambang Mahargiono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 10(2), 1-18. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Azahari, R. S. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id)*, 20, 20. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Badan Pusat Statistik. (2025). <https://magelangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/angka-kemiskinan.html> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- BPAD Kota Magelang. (2025). http://bpkad.magelangkota.go.id/?page_id=133 (Diakses tanggal 25 September 2025).
- BPS Indonesia, S. I. (2024). *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/infographic> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Darmawan, A. D. (2024). *Mayoritas Penduduk Kota Magelang Pada 2024 Adalah*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0b19469ffb97edc/mayoritas-penduduk-kota-magelang-pada-2024-adalah-usia-produktif#:~:text=Jumlah penduduk di Kota Magelang,ini sebesar 1%2C04%25> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Darmawan, A. D. (2025). *Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kota Magelang 2015-2024*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/77061b8a6d74bcf/5-94-penduduk-di-kota-magelang-masuk-kategori-miskin> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Deviana, Husaini, & Abdullah. (2018). Analisis Alokasi Belanja Modal Dalam Kabupaten Seluma. *Jurnal Feirfness*, 8(3), 183-198. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Digdowniseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572-2580. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Dwi Agustin, R., & subardjo, anang. (2017). *KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA PELAYANAN SEKTOR PUBLIK Anang Subardjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. <http://www.Ekonomirakyat.Org> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Elina, M. (2023). Buku Ajar Pengantar Ekonomi Pembangunan. In *Buku Ajaran Pengantar Ekonomi Pembangunan*. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Kementerian Keuangan. (n.d.). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Masiaga, N. R., Worang, F. G., & Mandagie, Y. (2022). Pengaruh Keamanan Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Yang Berbelanja Secara Online Di Lazada.Com. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 900-910. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.40476> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Natalia, N. D. A., Rumat, V. A., & Tolosang, K. D. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Sosial Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03), 97-106. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 20(2), 1689-1699. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- PPID Kota Magelang. (2025). https://v2.ppid.magelangkota.go.id/?page_id=8799 (Diakses tanggal 25 September 2025).

- Profil Kota Magelang*. (n.d.). <https://magelangkota.go.id/page/profil-kota-magelang-2> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Rahmawati, R. N., Partiwi, H. E., Lisniwati, M., Afiani, L. D., & Haryadi, A. K. (2024). Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 115-126. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.492> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Sirait, H. P. B. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Regional Kalimantan. *Journal Magister Ilmu Ekonomi*, 9(1), 39-54. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Triyulianto, T., Rizkia Nurvita, B. S., & Hidayaturahmi. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Good Governance*, 111-128. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807> (Diakses tanggal 25 September 2025).
- Wakhid, Y., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). *Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik*. 7(1), 233-245. (Diaakses tanggal 25 September 2025).
- Yuliyanto, W., Wahyuningsih, S., Kurniasih, R., & Waluyo, A. (2023). Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan “Value For Money” Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas “X” di Sektor Publik. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 233-245. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183> (Diakses tanggal 25 September 2025).